

BAB II

PROFIL KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sejarah perkembangan Kabupaten Indragiri Hulu menurut perkembangannya dikenal ada beberapa periode pemerintahan yang dilalui semenjak dari awal terbentuknya Kabupaten Indragiri Hulu hingga sekarang ini, yang secara ringkas dijelaskan sebagai berikut :

1. Periode Sebelum Tahun 1945

a. Zaman sebelum Penjajahan Kolonial Belanda

Zaman sebelum VOC daerah Indragiri Hulu dan Teluk Kuantan masih merupakan suatu Kerajaan. Kerajaan Indragiri diperintah oleh Raja atau Sultan yang berkedudukan di Pekan Tua yang letaknya sekitar 75 Km sebelah Timur kota Rengat. Raja pertamanya adalah Raja Kocik Mambang alias Raja Malayu I yang memerintah dari tahun 1298 sampai tahun 1337 dan Raja yang terakhir memerintah adalah Tengku Muhammad dengan gelar Sultan Muhammad Syeh.

Wilayah Kerajaan Indragiri pada waktu itu meliputi Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu sekarang, kecuali Kecamatan Cerenti, Kuantan Hilir, Kuantan Tengah, Kuantan Mudik yang merupakan bagian dari Kerajaan Kuantan sedangkan Kuantan Singingi pada waktu itu termasuk wilayah I Kerajaan Siak.

b. Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda

Setelah VOC datang pada waktu itu daerah ini dikuasai oleh pemerintah Belanda dengan nama Afdeling Indragiri yang pernah diperintah oleh seorang Afdeling yang terdiri dari :

- i. Order Afdeling/ District Rengat
- ii. Order Afdeling/ District Tembilahan
- iii. Order Afdeling/ District Teluk Kuantan

Order Afdeling ini dikepalai oleh seorang *District Hoofd*. Masing-masing District dibagi dalam empat (4) Order District Hoofd atau disebut AMIR dalam wilayah Kerajaan Indragiri.

Karena luasnya wilayah dan sulitnya komunikasi serta untuk kelancaran roda pemerintahan daerah, maka Sultan mengangkat beberapa orang AMIR yang sekarang dapat disebut sebagai Camat yaitu :

1. Amir yang berkedudukan di Kelayang untuk Order District Pasir Penyu
2. Amir yang berkedudukan di Rengat untuk Order District Rengat
3. Amir yang berkedudukan di Sungai Salak untuk Order District Tempuling
4. Amir yang berkedudukan di Tembilahan
5. Amir yang berkedudukan di Kateman

Khusus untuk daerah Rantau Kuantan dimana daerah ini tidak berada dibawah kekuasaan Sultan Indragiri. Daerah ini diperintah oleh seorang *Citroleor* yang berkedudukan di Teluk Kuantan. Kuantan ini merupakan daerah Otonom sendiri yang disebut dengan Kuantan Distraction, pada waktu itu kerajaan hanya berkuasa memegang urusan adat, agama, pengadilan kecil dan urusan rakyat.

c. Zaman Pemerintahan Fasis Jepang

Dengan kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya dan didudukinya Indonesia maka kemudin beralihlah kekuasaan dari Belanda kepada Jepang. Dan Indragiri pada waktu itu berada

dibawah fasis Jepang, penguasanya pada waktu itu disebut *Bunshiho* (Bupati) yang dibantu oleh *Gusaibu* (Patih)..

2. Periode Sesudah Tahun 1945

a. Periode Tahun 1945 - 1965.

Dengan diproklamasikan Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 maka di daerah-daerah kemudian dibentuk pula Lembaga Ketata Negaraan yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat :

1. Penyerahan wewenang sepenuhnya baik yang menyangkut kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan
2. Pelimpahan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan pusat kepada aparat daerah
3. Mengikutsertakan Organisasi pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah guna membantu pelaksanaan urusan pemerintah pusat

Berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 1948 kemudian dibentuk Kabupaten Indragiri yang termasuk bagian dari Propinsi Sumatra Tengah untuk kemudian direalisir dengan Surat Keputusan Gubenur Militer Sumatra Tengah pada tanggal 9 November 1948 nomor 10/GM/ST.49, kemudian ditindak lanjuti dengan Undang-undang nomor 4 tahun 1952 Jo Undang-undang nomor 12 tahun 1956 dibentuk daerah Otonom yang merupakan bagian dari Propinsi Sumatra Tengah.

Kabupaten Indragiri pada waktu itu terdiri dari empat (4) Kewedanaan yaitu:

1. Kewedanaan Indragiri Hilir Selatan,
2. Kewedanaan Indragiri Hilir Utara,
3. Kewedanaan Indragiri Hulu dan
4. Kewedanaan Kuantan Singingi.

Dari ke empat kewedanaan tersebut terbagi lagi dalam 17 Kecamatan. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 1963 status kewedanaan dihapus dan bersamaan dengan penghapusan empat Kewedanaan yang ada dalam Kabupaten Indragiri.

Selanjutnya dengan munculnya Undang-undang nomor 61 tahun 1958 dibentuklah Propinsi Riau dengan ibukotanya Pekanbaru yang terdiri dari lima daerah Tingkat II masing-masing:

1. Kabupaten Kampar,
2. Kabupaten Indragiri,
3. Kabupaten Bengkalis,
4. Kabupaten Kepulauan Riau dan
5. Kotamadya Pekanbaru.

b. Periode Tahun 1965 Sampai Sekarang

Dengan dibentuknya Propinsi Riau melalui Undang-undang nomor 61 tahun 1958; maka muncul beberapa kewedanaan yang ada dan salah satunya adalah kewedanaan Indragiri Hilir dan kewedanaan Indragiri Hulu.

Selanjutnya dengan perjuangan yang disalurkan melalui Panitia Persiapan Pembentukan kabupaten Indragiri Hilir dan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Kabupaten Indragiri timbul hasrat untuk dilakukan pemekaran yang mendapat dukungan dari DPRD Riau dan DPRGR Pusat.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 1965 maka terjadilah pemekaran Kabupaten Indragiri menjadi dua Kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Indragiri Hilir dengan ibukotanya Tembilahan, terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan, yang sekarang menjadi 11 (sebelas) Kecamatan

2. Kabupaten Indragiri Hulu dengan Ibukotanya Rengat, terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan yaitu :

- a. Kec. Rengat, ibukota Rengat
- b. Kec. Pasir Penyau, ibukota Air Molek
- c. Kec. Seberida, ibukota Pangkalan Kasai
- d. Kec. Peranap, ibukota Peranap
- e. Kec. Kuantan Hilir, ibukota Baserah
- f. Kec. Kuantan Tengah, ibukota Taluk Kuantan
- g. Kec. Kuantan Mudik, ibukota Lubuk Jambi
- h. Kec. Singingi, ibukota Muara Lembu

Kemudian pada tahun 1996 terjadi lagi penambahan Kecamatan yaitu dengan adanya pemekaran Kecamatan Kuantan Tengah, Pasir Penyau, dan Rengat, di mana Kecamatan yang baru itu adalah :

1. Kec. Benai, ibukota Benai
2. Kec. Kelayang, ibukota Simpang Kelayang
3. Kec. Rengat Barat, ibukota Pematang Reba

Pada tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu kemudian dipecah lagi menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi berkedudukan di Taluk Kuantan dan Kabupaten Indragiri Hulu berkedudukan tetap di Rengat.

Selanjutnya Kabupaten Indragiri Hulu mengalami beberapa pemekaran wilayah Kecamatan sehingga menjadi 14 (empat belas kecamatan) Kecamatan :

1. Kec. Rengat , ibukota Rengat
2. Kec. Rengat Barat, ibukota Pematang Reba
3. Kec. Seberida, ibukota Pangkalan Kasai
4. Kec. Batang Gansal, ibukota Seberida
5. Kec. Batang Cenaku, ibukota Aur Cina
6. Kec. Pasir Penyau, ibukota Air Molek
7. Kec. Lirik, ibukota Lirik

8. Kec. Kelayang, ibukota Simpang Kelayang
9. Kec. Peranap, ibukota Peranap .
10. Kec. Batang Peranap, ibukota Pematang
11. Kec. Rakit Kulim, ibukota Petonggan
12. Kec. Sungai Lala, ibukota Kelawat
13. Kec. Lubuk Batu Jaya, ibukota Lubuk Batu Tinggi
14. kec. Kuala Cenaku, ibukota Kuala Cenaku

2. Kondisi Geografis Kabupaten Indragiri Hulu.

Konon menurut Latief Nazar (dalam U.P Ismail dkk, 1995; 15) di atas bumi Riau yang luasnya 9.4 juta ha ini diantaranya sekitar 4 juta ha, merupakan lahan gambut dengan ketebalan lebih besar dari 100 cm yang memiliki potensi besar untuk pengembangan areal pertanian. Kondisi demikian hampir terdapat di setiap daerah yang ada di daerah Riau tidak terkecuali untuk Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan luas wilayah 8.195,26 Km² Kabupaten Indragiri Hulu memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo Tebo Propinsi Jambi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir.

Ibukota Kabupaten Indragiri Hulu adalah Rengat yang mencakup area seluas 1.210,05 km². Kota penting lainnya di Kabupaten ini adalah Pematang Reba, Air Molek, Seberida, Peranap, dan Kelayang. Rengat adalah salah satu kota bisnis yang sangat berperan penting di Riau, bahkan di seluruh bagian pusat Sumatera. Hingga tahun 50-an, pelabuhannya dipadati oleh aktivitas, dari tempat ini para pedagang dan pengusaha

perkebunan mengapalkan hasil karet mereka. Selain hai itu Industri yang terdapat di Indragiri Hulu adalah industri kecil seperti memberi motif pada kain, dodol kedondong, keripik pisang dan lainnya.

Untuk mewujudkan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu, maka pemerintah daerah Indragiri Hulu menetapkan Visi, yaitu : *Terwujudnya Kabupaten Indragiri Hulu yang maju, mandiri sejahtera, ber- budaya dan agamis tahun 2020.* sedangkan Misinya adalah :

1. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil dan siap menghadapi tantangan masa depan yang dilandasi oleh kekuatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu menguasai IPTEK
2. Memelihara nilai-nilai luhur budaya daerah yang berpijak pada nilai-nilai agama guna menyaring pengaruh budaya lain untuk mempertahankan identitas dan integritas Kabupaten Indragiri Hulu
3. Memberdayakan kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas manajemen, permodalan, produksi dan peningkatan kemampuan dalam mengakses sumber-sumber bahan baku, teknologi, pasar dan faktor lainnya.
4. Mengembangkan industri-industri yang berbasis pertanian (Agroindustri) dengan mengembangkan industri turunan yang berorientasi pada pasar lokal dan ekspor
5. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur yang mampu membuka isolasi daerah, mengembangkan potensi daerah, mengem-

2. Membangun dan meningkatkan jangkauan pelayanan Infrastruktur
3. **Memberdayakan** potensi ekonomi masyarakat yang berskala kecil menengah agar dapat berperan dan menjadi basis perekonomian yang tangguh
4. Penanggulangan kemiskinan
5. Meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. Perkembangan Perekonomian.

Perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu telah membuat Kabupaten Indragiri Hulu juga banyak mengalami perubahan struktur ekonomi, baik dari kegiatan ekonomi yang baru muncul atau yang lama tapi dengan teknologi baru, seperti *Hand Phone*, teknologi TV layar datar, pembudidayaan sarang burung walet, dan sebagainya.

Seiring dengan perkembangan ekonomi, Era Otonomi daerah telah memberikan angin segar bagi setiap Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah untuk melakukan penataan manajemen pembangunan secara lebih terarah dan terpadu sesuai dengan ciri khas masing-masing daerah, yang sebelumnya diatur secara sentralistik. Berbagai aktivitas pembangunan daerah di Kabupaten Indragiri Hulu, baik yang telah maupun yang sedang dilaksanakan, terus dipantau dan dievaluasi tingkat kinerjanya,

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu (tanpa migas) menurut lapangan usaha pada tahun 2005 ini menunjukkan arah yang menggembirakan. Laju pertumbuhan per sektor dapat dilihat pada Tabel 2.1. Semakin pesatnya pertumbuhan perekonomian Riau pada tahun 2005 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,53 secara tidak langsung juga mempengaruhi roda

perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2005 mengalami pertumbuhan sebesar 8,26 persen, sedikit mengalami percepatan pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 7,31 persen. Dampak kenaikan BBM walaupun sedikit berpengaruh namun secara umum dampaknya tidak terlalu terlihat pada aktifitas ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini disebabkan perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu masih sebagian besar adalah sektor pertanian, dimana bisa dilihat dari kontribusi sektor ini yang cukup besar yaitu diatas 47 persen.

Tabel 2.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kab. Indragiri Hulu, 2003 – 2005 (%)

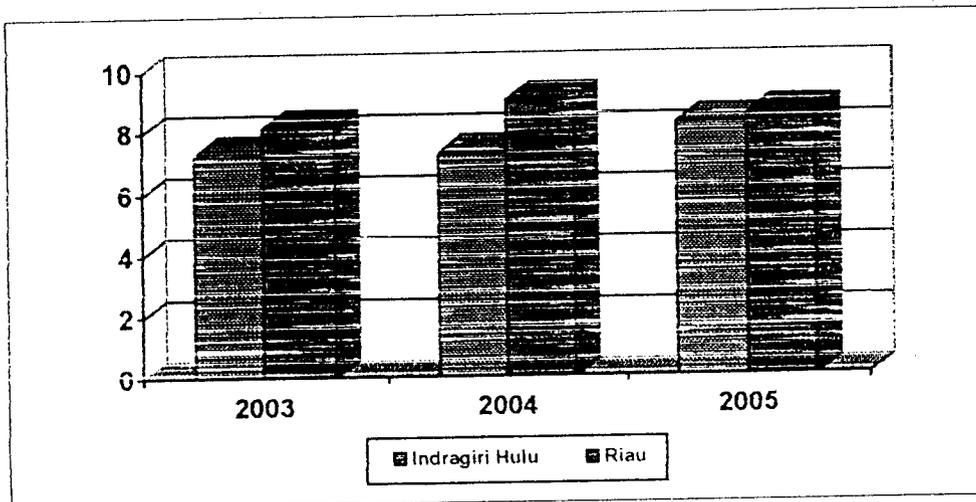
Lapangan Usaha	2003	2004	2005*
1. Pertanian	5,29	4,44	4,99
2. Pertambangan & Penggali.	6,06	10,41	8,35
3. Industri Pengolahan	13,39	14,28	13,99
4. Listrik dan Air Minum	2,90	5,31	7,61
5. Bangunan	5,34	5,37	7,06
6. Perdagangan	8,91	8,44	8,25
7. Angkutan & Komunikasi	9,40	8,75	9,14
8. Keuangan	10,74	15,98	10,20
9. Jasa-jasa	5,87	8,16	7,22
INDRAGIRI HULU	7,29	7,31	8,26
RIAU	8,17	9,01	8,53

Keterangan: *) Angka Sementara

Sumber : Pendapatan Regional Indragiri Hulu Menurut Lapangan Usaha 2003 – 2005, BPS Inhu, 2006

Grafik 2.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas Kab. Indragiri Hulu dan Provinsi Riau, 2003-2005



Sumber : Pendapatan Regional Indragiri Hulu Menurut Lapangan Usaha 2003 – 2005, BPS Inhu, 2006

Bila dilihat lebih jauh, pertumbuhan ekonomi sektor lainnya di Kabupaten Indragiri Hulu cukup baik. Pertumbuhan sektor-sektor tersebut masih diatas tujuh persen. Bila kita rinci pertumbuhan sektor-sektor tersebut yaitu sektor pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 8,35 persen, sektor listrik dan air minum tumbuh sebesar 7,61 persen, sektor bangunan tumbuh sebesar 7,06 pesen, sektor perdagangan tumbuh sebesar 8,25 persen, sektor angkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 9,14 persen dan sektor jasa-jasa tumbuh sebesar 7,22 persen. Walaupun ada perlambatan pada sektor-sektor tertentu akibat pengaruh naiknya BBM seperti pada sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, dan sektor jasa-jasa, namun pertumbuhan sektor-sektor tersebut masih cukup baik.

Dari sajian data di atas tampak bahwa PDRB Kabupaten telah menunjukkan angka perubahan yang cukup baik. Ini

menandakan bahwa pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat telah cukup berhasil dijalankan di daerah ini.

Besaran PDRB perkapita yang dicapai Kabupaten Indragiri Hulu terus menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, bahkan bila dibandingkan dengan PDRB per kapita dan pendapatan per kapita Propinsi Riau nilainya lebih tinggi, baik secara harga berlaku maupun konstan, namun besaran PDRB per kapita dan pendapatan perkapita Kabupaten Indragiri Hulu masih kalah dengan kabupaten pecahan-nya yaitu Kabupaten Kuantan Singingi.

Meskipun PDRB per kapita Kabupaten Indragiri Hulu terus mengalami peningkatan dari 13,25 juta rupiah pada tahun 2003 menjadi 19,99 juta rupiah tahun 2005, namun kenaikannya lebih rendah dibandingkan Kabupaten Kuantan Singingi. PDRB per kapita Kabupaten Kuantan Singingi meningkat dari 13,55 juta rupiah pada tahun 2003 menjadi 21,39 juta rupiah pada tahun 2005. Walaupun PDRB dan pendapatan per kapita Kabupaten Indragiri Hulu lebih kecil dari Kabupaten Kuantan Singingi, belum berarti bahwa tingkat kesejahteraannya lebih baik. Besarnya PDRB dan Pendapatan per kapita dipengaruhi oleh banyaknya penduduk suatu daerah.

Secara umum adanya peningkatan PDRB per kapita diseluruh kabupaten/kota di Propinsi Riau, menggambarkan peningkatan perekonomian di kabupaten kota tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan pola yang sama seperti dalam analisis PDRB per kapita, perkembangan pendapatan perkapita kedua Kabupaten tersebut dapat dilihat lebih jauh pada Tabel 2.2 dan 2.3 berikut .:

Tabel 2.2

PDRB Perkapita Kabupaten/ Kota Se-Propinsi Riau, 2003-2005
(Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2003	2004	2005*
A. Atas Dasar Harga Berlaku			
1. Kuantan Singingi	13,55	17,36	21,39
2. Indragiri Hulu	13,25	16,11	19,99
3. Indragiri Hilir	9,73	12,68	15,33
4. Pelalawan	21,19	24,47	29,43
5. Siak	19,81	24,48	28,52
6. Kampar	8,13	9,55	11,29
7. Rokan Hulu	10,58	12,82	15,52
8. Bengkalis	9,01	10,99	13,04
9. Rokan Hilir	10,60	12,98	15,79
10. Pekanbaru	13,39	16,23	18,67
11. Dumai	8,19	9,14	10,05
RIAU	11,70	14,28	17,13
B. Atas Dasar Harga Konstan			
1. Kuantan Singingi	7,37	8,02	8,66
2. Indragiri Hulu	8,69	9,26	9,97
3. Indragiri Hilir	6,43	6,92	7,38
4. Pelalawan	9,17	9,35	9,69
5. Siak	8,40	8,77	9,15
6. Kampar	5,33	5,69	6,04
7. Rokan Hulu	4,84	5,18	5,52
8. Bengkalis	4,56	4,74	4,99
9. Rokan Hilir	5,80	6,15	6,57
10. Pekanbaru	6,79	7,18	7,36
11. Dumai	5,65	5,89	6,05
RIAU	6,40	6,83	7,26

Sumber : Pendapatan Regional Indragiri Hulu Menurut Lapangan
Usaha 2003 – 2005, BPS Inhu, 2006

Keterangan: *) Angka Sementara

Tabel 2.3

Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota Se-Propinsi Riau, 2003-2005
(Juta Rupiah).

Kabupaten/Kota	2003	2004	2005*
A. Atas Dasar Harga Berlaku			
1. Kuantan Singingi	12,39	15,87	19,55
2. Indragiri Hulu	12,11	14,73	18,27
3. Indragiri Hilir	8,89	11,59	14,01
4. Pelalawan	19,37	22,37	26,91
5. Siak	18,11	22,38	26,07
6. Kampar	7,43	8,73	10,32
7. Rokan Hulu	9,68	11,72	14,19
8. Bengkalis	8,24	10,05	11,92
9. Rokan Hilir	9,69	11,87	14,44
10. Pekanbaru	12,24	14,84	17,07
11. Dumai	7,49	8,36	9,19
RIAU	11,33	13,91	15,66
B. Atas Dasar Harga Konstan			
1. Kuantan Singingi	6,74	7,33	7,92
2. Indragiri Hulu	7,94	8,47	9,12
3. Indragiri Hilir	5,88	6,32	6,74
4. Pelalawan	8,38	8,55	8,86
5. Siak	7,68	8,02	8,37
6. Kampar	4,87	5,20	5,52
7. Rokan Hulu	4,42	4,73	5,04
8. Bengkalis	4,17	4,33	4,56
9. Rokan Hilir	5,30	5,62	6,01
10. Pekanbaru	6,21	6,56	6,73
11. Dumai	5,16	5,39	5,53
RIAU	6,20	6,66	6,64

Keterangan: *) Angka Sementara

Sumber : Pendapatan Regional Indragiri Hulu Menurut Lapangan
Usaha 2003 – 2005, BPS Inhu, 2006

Selama kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 2003 sampai dengan 2005 terdapat peningkatan pendapatan per kapita. Hampir seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan pendapatan per kapita. Dimana kecenderungannya hampir sama dengan PDRB per kapita.

Dilihat dari perkembangan neraca keuangan dimaksud, maka tampak bahwa pembangunan di daerah ini (Kab. Indragiri Hulu) dapat menyentuh semua unsur dan roda ekonomi masyarakat terkait dengan berbagai sektor usaha yang berkembang. Selain itu tampak bahwa adanya peningkatan PDRB ini juga berkaitan dengan adanya kenaikan PAD yang dihasilkan pemerintah daerah Indragiri Hulu.

Adanya peningkatan PAD yang dihasilkan dari berbagai pajak di kabupaten ini sangat terkait dengan adanya kenaikan pendapatan masyarakat dan animo investor dalam menanamkan modal di daerah ini. Selanjutnya berdasarkan prediksi arus investasi yang diharapkan akan masuk di Kabupaten ini diperkirakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Perkiraan investasi di Kab. Indragiri Hulu tahun 2001 - 2005 (dalam Miliar Rupiah)

NO	SEKTOR	2001	2002	2003	2004	2005
1	PERTANIAN	26.03	27.50	28.97	30.48	31.88
	a. TANAMAN PANGAN	5.17	5.48	5.80	6.12	6.44
	b. PERKEBUNAN	16.08	16.95	17.81	18.67	19.53
	c. PETERNAKAN	0.54	0.58	0.62	0.65	0.69
	d. PERIKANAN	0.64	0.68	0.73	0.77	0.81
	e. KEHUTANAN	3.60	3.81	4.01	4.27	4.41
2	PERTAMBANGAN	7.88	8.69	9.51	10.32	12.37
3	INDUSTRI	34.73	37.70	40.67	43.64	46.62
4	LISTRIK	1.18	1.29	1.39	1.49	1.60
5	BANGUNAN	31.91	34.71	37.51	40.32	43.12
6	PERDAGANGAN	23.19	24.57	25.94	27.31	28.67
	a. PERDAGANGAN	16.81	17.61	18.40	19.19	19.98
	b. HOTEL/RESTORAN	6.38	6.96	7.54	8.12	8.69
7	PENGANGKUTAN	7.42	7.91	8.40	8.88	9.37
8	BANK	7.84	8.41	8.98	9.55	10.12
9	JASA	6.06	6.49	6.93	7.37	7.80
	PDRB	146.24	157.27	168.30	179.36	191.55

Sumber Buku potensi daerah Kab. Inhu 2003

Dari hasil kajian di atas tampak bahwa PDRB dan PAD di kabupaten ini secara umum menunjukkan arah perbaikan. Kendatipun menunjukkan arah perbaikan, tetapi hal ini tidak berkaitan secara erat dengan kemampuan masyarakatnya. Hal ini dapat diamati dari hasil kajian tentang kemiskinan yang dilaporkan Balitbang Propinsi Riau (2004).

Dari hasil kajian itu dilaporkan bahwa masih banyak jumlah rumah tangga miskin di daerah tersebut. Lebih jauh dilaporkan menurut hasil kajian tersebut ditemukan masih banyak rumah tangga miskin di daerah ini yang tidak memiliki aset. Hal ini ditunjukkan dengan uraian berikut :

4. Penduduk dan Kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Berbicara masalah kemiskinan dalam kontek pembangunan daerah di Indonesia, sebenarnya termasuk dalam pembicaraan yang tidak kunjung usai. Karena masalah kemiskinan di Indonesia masih belum tertuntaskan secara utuh dan bersifat multi dimensi. Tetapi berdasarkan hasil kajian Balitbang (2004) menemukan bahwa kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu berkemiripan dengan daerah-daerah lain, yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.5.

Penduduk Miskin dan Sangat Miskin Tanpa Aset di kabupaten Indragiri Hulu

SANGAT MISKIN	MISKIN	TOTAL
466	222	688
1.04%	2.18%	3.22%

Sumber Sensus Balitbang Propinsi Riau 2004, diolah.

Untuk Kepemilikan Aset, berdasarkan data di atas dapat di simpulkan bahwa dilihat dari nominal dan prosentase Strata kelompok sangat miskin lebih rendah jika di dibandingkan dengan kelompok Strata miskin, artinya bahwa di kab. Indragiri Hulu kelompok keluarga Strata sangat miskin mempunyai asset yang besar jika di dibandingkan dengan kelompok masyarakat Strata miskin.

Jumlah nominal untuk Strata sangat miskin yang tidak memiliki asset sebesar 222 (KK) dan untuk kelompok Strata miskin sebesar 466, jumlah dari kedua kelompok tersebut sebesar 688(KK). Sementara dilihat dari prosentase jumlah kelompok Strata sangat miskin sebesar 1.04% dan untuk kelompok Strata miskin sebesar 2.18%, jumlah dari kedua kelompok tersebut sebesar 3.22%.

Tabel 2.6

Penduduk Miskin dan Sangat Miskin Tanpa Aset menurut Jenisnya di Kab. Indragiri Hulu

TANPA ASET	Pekara ngan	Sawah	Karet	Sawit	Sapi	Kam-bing	Itik	Lahan Tidur
SANGAT MISKIN	973	3,603	2,471	3,523	3,496	3,528	2,388	2,886
	25.75%	95.40%	65.43%	93.29%	92.58%	93.42%	63.23%	76.41%
MISKIN	4,024	16,329	12,214	15,941	16,336	16,694	10,588	14,241
	22.91%	92.97%	69.54%	90.76%	93.01%	95.05%	60.29%	81.08%

Sumber : Sensus Balitbang Propinsi Riau 2004, diolah.

Selanjutnya dengan pola kemiskinan dan masih banyaknya penduduk yang terkategori miskin di daerah ini, kenyataan lain menunjukkan bahwa pola kerja dan motivasi kerja mereka dalam budaya kemiskinan yang adapun kurang menunjukkan gairah kerja yang ada. Ini ditunjukkan dari sajian dan laporan Balitbang (2004) sebagai berikut :

Tabel 2.7

Penduduk Miskin dan Sangat Miskin menurut Perilaku dan Motivasi Kerja di Kabupaten Indragiri Hulu

SANGAT MISKIN			MISKIN		
TUNDA	MOOD	ARAHAN	TUNDA	MOOD	ARAHAN
684	389	5	5,027	1,108	51
18.10%	10.29%	0.14%	28.62%	6.31%	0.29%

Sumber : Sensus Balitbang Propinsi Riau 2004, diolah.

Untuk melihat pola perilaku kerja yang kurang efektif dan efisien maka dapat di lihat dari sikap / kebiasaan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, dari tabel olahan di atas peneliti mengambil variabel pola menunda pekerjaan and pola bekerja sesuai mood, hal itu di maksudkan untuk melihat sampai sejauh mana tingkat kesadaran anggota keluarga dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, karena pola kedua pola tersebut adalah pola yang tidak efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Dengan mengambil variabel Pola ini kita dapat melihat pada kelompok Strata mana antara keluarga sangat miskin dengan keluarga miskin yang memiliki pola tersebut di atas.

Berdasarkan data tabel di atas maka dapat di simpulkan, bahwa dilihat dari nominal jumlah keluarga yang memiliki pola kerja yang senang menunda pekerjaan lebih banyak pada Strata keluarga miskin yaitu sebesar 5,027KK) sedangkan pada kelompok keluarga sangat miskin sebesar 684(KK) artinya dilihat dari nominal keluarga yang pola kerjanya sering menunda pekerjaan lebih banyak pada kelompok keluarga miskin, jika kita melihat dari sisi prosentase ternyata jumlah keluarga yang pola kerjanya sering menunda pekerjaan juga ada pada kelompok miskin yaitu sebesar 28.62% sedangkan pada kelompok keluarga sangat miskin hanya sebesar 18.10%.

Untuk pola kerja sesuai dengan mood, berdasarkan data di atas dapat di simpulkan bahwa kelompok keluarga yang memiliki pola pola kerja sesuai dengan mood dilihat dari nominal lebih banyak pada Strata keluarga miskin yang sebesar 1,108(KK) sedangkan pada kelompok keluarga sangat miskin sebesar 389(KK) artinya dilihat dari nominal jumlah keluarga yang pola kerjanya sesuai dengan mood mereka lebih banyak pada kelompok keluarga miskin, namun sebaliknya dilihat dari prosentase ternyata yang pola kerjannya hanya berdasarkan mood lebih banyak ada pada kelompok keluarga sangat miskin yaitu sebesar 10.29% sedangkan pada kelompok keluarga miskin hanya 6.31%.

Untuk melihat dorongan kesadaran bekerja dari masyarakat / keluarga maka dapat di lihat dari sikap mereka di dalam mengerjakan suatu pekerjaan, apakah adanya dorongan rasa tanggung jawab pribadi atau hanya menuruti arahan dari pimpinan, dari tabel olahan di atas peneliti mengambil variabel dorongan kerja berdasarkan arahan pimpinan, hal itu di maksudkan untuk melihat sampai sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat / anggota keluarga dalam perilaku kerjanya, karena pola tersebut adalah pola yang tidak profesional dalam dunia kerja. Dengan mengambil variabel Pola ini kita dapat melihat pada kelompok Strata mana antara keluarga sangat miskin dengan keluarga miskin yang memiliki pola yang kurang profesional.

Berdasarkan data tabel di atas maka di atas dapat di simpulkan, bahwa dilihat dari nominal kesadaran kerja yang kurang baik yang hanya menuruti perintah pimpinan lebih besar ada pada Strata kelompok keluarga miskin yaitu sebesar 51 (KK), sedangkan Strata keluarga sangat miskin hanya 5(KK), artinya dilihat dari nominal perilaku kerja yang kurang profesional dan hanya mengandalkan arahan dari pimpinan sebagian besar ada pada

kelompok Strata keluarga miskin. Sedangkan dilihat dari prosentase antara kelompok keluarga sangat miskin dengan keluarga miskin kesadaran kerja yang masih pada orientasi perintah / arahan dari pimpinan juga lebih banyak pada kelompok Strata keluarga Miskin.